

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah proses pembelajaran di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan berlangsung melalui berbagai metode, termasuk pengajaran formal di sekolah, pengalaman informal dalam kehidupan sehari-hari, dan pelatihan di tempat kerja. Pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tidak hanya berperan dalam peningkatan kualitas hidup individu tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan perkembangan budaya.

Tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, memiliki kecakapan hidup serta memiliki kompetensi baik akademik ataupun non akademik yang dapat bersaing seiring dengan perkembangan zaman. Peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan melalui berbagai cara, mengingat pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Agar peningkatan mutu pendidikan dapat terus berjalan dengan baik, diperlukan tenaga pendidik yang professional. Melalui tenaga pendidik yang professional, diharapkan proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar.

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah penerapan pendidikan inklusif. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peraturan Bupati Garut Nomor 735 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pasal

2 menyatakan bahwa Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pendidikan inklusif adalah realisasi dari hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan. Dengan dasar ini, konsekuensi logisnya adalah semua anak berhak menerima pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, termasuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus. Mengingat kebutuhan yang beragam, sekolah inklusi berperan dalam menanggapi kebutuhan seluruh siswa melalui pembelajaran yang mendorong partisipasi siswa, memperhatikan budaya masyarakat, dan meminimalkan praktik eksklusif. Pendidikan inklusif, yang menekankan penerimaan dan pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menjadi isu sentral dalam konteks pendidikan saat ini. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pasal 1(7) mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan kesiapan guru dalam menghadapi regulasi dan implementasi pendidikan inklusif. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pasal 1(11) mengatakan bahwa guru pendidik khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki standar kualitas akademik paling rendah Diploma4/Strata 1 Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus dan kompetensi pendidikan khusus, yang diberi tugas tambahan menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum/kejuruan yang menyelenggarakan

pendidikan inklusif. Kepala sekolah harus memimpin dengan visi yang jelas, memastikan staf sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pendidikan inklusif. Namun, dalam konteks Society 5.0 yang gejolak, belum banyak penelitian yang mendalam mengenai peran kepala sekolah dalam konteks ini. Dalam model sekolah inklusif, guru menggunakan berbagai metode pengajaran dan gaya presentasi untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari sekolah (Stubbs, 2008).

Kedudukan kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi dan harus membawahi, mengayomi semua sumberdaya manusia di sekolah tersebut. Dalam peran ini, kepala sekolah adalah penanggung jawab terhadap pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh seluruh unsur warga sekolah. Sebagai seorang pemimpin, wajar jika kepala sekolah dituntut untuk mengupayakan pelaksanaan proses pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang kepala sekolah memiliki beberapa fungsi atau peran penting. Selain sebagai pemimpin, peranan kepala sekolah dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan lembaga adalah sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai wiraswastawan, sebagai penyelia, sebagai pembina iklim sekolah, sebagai pendidik, kepala sekolah juga harus mampu menggerakkan seluruh warga sekolah baik guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat dan sarana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan kepala sekolah tersebut antara lain konstruktif, kreatif, partisipatif, kooperatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif. Keberadaan kepala sekolah dalam setiap jenjang pendidikan sangatlah penting. Dengan terpusatnya kewenangan sekolah ditangan kepala sekolah, maka kepala sekolah menjadi figur sentral sebagai top manager dan menjadi penentu keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Keberadaan kepala sekolah kaitannya dengan keberhasilannya mencapai tujuan pendidikan, sangat ditentukan oleh pengelolaan sekolahnya. Pengelolaan sekolah yang berhasil sangat

ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Keberadaan kepala sekolah tersebut sangat terkait dengan kemampuannya dalam mengelola sekolah.

Kepala sekolah baik di sekolah negeri, swasta, sekolah reguler, sekolah luar biasa, ataupun sekolah inklusif, kepala sekolah juga sebagai leader dan manajer, harus mempunyai program dan target yang harus dipenuhi selama masa kepemimpinannya, oleh sebab itu harus memiliki pemahaman yang baik mengenai visi, misi dan kemampuan menganalisis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Analisis tersebut harus dijadikan dasar bagi pelaksanaan pekerjaan. Kemampuan analitis adalah kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya, anak buahnya serta potensi dan peluang yang dapat dikembangkan, juga kemampuan untuk mengenali ancaman yang mungkin timbul dalam kepemimpinannya perlu dikenali lewat ketajaman analisisnya. Semakin tajam daya analitisnya seorang kepala sekolah maka akan semakin memungkinkan untuk dapat berprestasi dan melakukan sesuatu yang lebih baik.

Kepala sekolah sebagaimana dalam permendiknas No 13 tahun 2007 juga dituntut memiliki lima kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mengetahui seluk-beluk bidang yang dihadapinya atau menjadi bidang garapan organisasinya. Sebagai seorang kepala sekolah keterampilan teknis yang dimiliki adalah kemampuannya membuat program pengajaran, rencana pembelajaran, menyajikan materi pelajaran, mengevaluasi, membimbing siswa dan menguasai materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Keterampilan ini tidak saja untuk digunakan karena kepala sekolah masih mempunyai kewajiban untuk mengajar, tetapi digunakan untuk mensupervisi guru yang merupakan tugas kepala sekolah, seseorang tidak bisa mensupervisi jika tidak menguasainya. Kemampuan ini tidak hanya di sekolah reguler, sekolah luar biasa, namun juga di sekolah inklusi.

Kesiapan guru sekolah reguler dalam implementasi pendidikan inklusi antara lain di bidang kurikulum dan pembelajaran, termasuk sarana pendukung pembelajaran. Menghadapi siswa mengharuskan guru sekolah reguler memiliki kesiapan mengakomodasi kebutuhan belajar beragam, khususnya fakta ketika

berhadapan dengan peserta didik berkebutuhan khusus. (Myers, 2014). Kesiapan guru regular merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan inklusi, termasuk kesiapan untuk mengenal personal, sosial, dan potensi peserta didik. Guru sekolah regular untuk siap pada aspek tersebut perlu memiliki kompetensi asesmen, menafsirkan hasil asesmen, selanjutnya merancang program belajar dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik yang beragam. Termasuk kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, karena di antara keberagaman tersebut pasti ada yang beragam sangat signifikan. Keberagaman yang signifikan itu yang dijumpai sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. (Kwon, Hong, & Jeon, 2017).

Pendidikan inklusi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi *Society 5.0* untuk memastikan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di era digital ini. *Society 5.0* adalah masyarakat yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan menggunakan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0, seperti *Internet of Things* (Internet untuk semua), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data* (informasi dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup. *Society 5.0* juga dapat diartikan sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi.

Era *Society 5.0* memiliki banyak tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan. Termasuk apa yang harus dilakukan unit diklat sebagai pintu gerbang utama menyiapkan SDM unggul. Era masyarakat super cerdas (*Society 5.0*) sendiri diantar oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019, mengantisipasi ketidakpastian yang kompleks dan ambigu akibat gejala Revolusi Industri 4.0 (VUCA). Serangan itu dikhawatirkan merusak nilai-nilai kodrat manusia yang bertahan hingga saat ini. Di Era Masyarakat 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain pendidikan, banyak faktor dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan masyarakat luas juga turut andil dalam menyongsong *Age of Society 5.0* mendatang. Untuk menghadapi era *Society 5.0*, satuan pendidikan juga membutuhkan perubahan paradigma di bidang pendidikan. Melaluinya, guru meminimalkan perannya sebagai penyedia materi pembelajaran, pendidik menjadi inspirasi bagi

tumbuhnya kreativitas peserta didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator, pendidik, penginspirasi, dan pembelajar sejati yang mendorong siswa untuk "Merdeka Belajar" Sebagai Pendidik di era society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan dibidang digital dan berpikir kreatif. Menurut Zulfikar Alimuddin, *Director of HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services)* menilai di era masyarakat 5.0, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan awal yang peneliti lakukan, data yang didapatkan pada artikel Kompas (2023), menyebutkan bahwa Jumlah guru pendamping khusus di Indonesia hanya 4.695 orang, sementara murid disabilitas 135.874 orang. Jumlah ini tidak mencukupi. Defisit guru pendamping khusus menjadi masalah besar dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi terhambat. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan per Mei 2023, jumlah guru pendamping khusus di Tanah Air 4.695 orang dan 10.244 guru reguler yang dilatih mendampingi penyandang disabilitas. Sementara Indonesia memiliki 40.165 sekolah inklusi di tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan total murid penyandang disabilitas mencapai 135.874 orang. Di sekolah luar biasa ada 2.326 sekolah yang melayani 152.756 murid. Padahal, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif mewajibkan setiap sekolah memiliki minimal satu guru pembimbing khusus.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Garut tercatat sebanyak 34 sekolah, sementara jumlah sekolah inklusif tidak lebih dari 10. Keterbatasan ini semakin diperburuk oleh minimnya jumlah guru pendamping khusus yang tersertifikasi. Saat ini, hanya terdapat dua orang Guru Pendamping Khusus (GPK) yang tersertifikasi oleh kementerian di Kabupaten Garut. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik profesional dan fasilitas pendidikan inklusif masih menjadi tantangan besar di daerah tersebut. Defisit ini berdampak pada keterbatasan akses pendidikan yang layak bagi anak-

anak penyandang disabilitas di wilayah Garut, sekaligus menunjukkan perlunya intervensi yang lebih strategis untuk mengatasi kesenjangan ini.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pendidikan inklusif menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) mengindikasikan bahwa dalam hal kompetensi pedagogik, para pengajar mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus dan merancang Program Pembelajaran Individual (PPI). Sementara pada aspek kompetensi kepribadian, sebagian pengajar masih merasa bahwa pengembangan diri bukanlah tanggung jawab mereka. Pada sisi kompetensi sosial, pengajar mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswa yang memiliki hambatan komunikasi. Terakhir, dalam hal kompetensi profesional, kemampuan pengajar sangat bergantung pada latar belakang pendidikan dan kapasitas belajar masing-masing individu (Putri, 2019). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ismunandar dan Kurnia (2023), salah satu kendala yang muncul diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam aplikasi teknologi dan ketersediaan sarana/mediapendukung pembelajaran di sekolah sehingga membutuhkan waktu lama dalam proses transformasi dan adaptasi seorang pendidik dalam menghadirkan teknologi dalam setiap pembelajarannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memutuskan untuk dapat menganalisa lebih jauh dengan melakukan penelitian mengenai "Peran Kepala Sekolah dan Regulasi terhadap Kesiapan Guru Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif Di Era Society 5.0".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini merumuskan masalah utama yaitu bagaimana peran kepala sekolah dan regulasi terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era Society 5.0. Rumusan masalah khusus yang akan dibahas meliputi:

1. Apakah peran kepala sekolah dalam dimensi kepribadian yang kuat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?

2. Apakah peran kepala sekolah dalam dimensi pemahaman tujuan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?
3. Apakah peran kepala sekolah dalam dimensi pengetahuan yang luas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?
4. Apakah peran kepala sekolah dalam dimensi keterampilan professional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?
5. Apakah regulasi pusat mengenai pendidikan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?
6. Apakah regulasi daerah mengenai pendidikan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?
7. Apakah peran kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?
8. Apakah regulasi mengenai pendidikan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran kepala sekolah dan regulasi terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era Society 5.0. Adapun tujuan khusus dari penelitian adalah berikut ini.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran kepala sekolah dalam dimensi kepribadian yang kuat terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran kepala sekolah dalam dimensi pemahaman tujuan pendidikan terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran kepala sekolah dalam dimensi pengetahuan yang luas terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran kepala sekolah dalam dimensi keterampilan profesional terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi pusat mengenai pendidikan inklusif terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi daerah mengenai pendidikan inklusif terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran kepala sekolah terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi mengenai pendidikan inklusif terhadap kesiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif di era society 5.0 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks pendidikan inklusif dan kepemimpinan pendidikan di era Society 5.0, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur, memberikan panduan praktis, dan membantu para pemangku kepentingan memahami serta mengimplementasikan pendidikan inklusif yang efektif. Berikut adalah manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dapat membantu memperkaya dan memperluas teori kepemimpinan pendidikan dengan mengeksplorasi peran kepala sekolah dalam konteks pendidikan inklusif di era Society 5.0. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peran kepemimpinan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat.
2. Penelitian ini dapat mengembangkan teori dan pemahaman tentang pendidikan inklusif, terutama dalam konteks Society 5.0. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pendidikan inklusif dan bagaimana kepala sekolah dapat berperan dalam meningkatkan kesiapan guru dalam hal ini.
3. Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana pendidikan inklusif dapat diintegrasikan dengan konsep Society 5.0, yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, kolaborasi, dan konektivitas yang tinggi. Hal ini dapat membantu mengembangkan teori tentang pendidikan di era baru ini. Dengan memahami peran kepala sekolah dalam meningkatkan kesiapan guru terkait pendidikan inklusif, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang cara meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Teori-teori yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk perbaikan pendidikan inklusif di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Guru
 - a. Penelitian ini akan membantu guru dalam memahami peran kepala sekolah dalam meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi regulasi dan implementasi pendidikan inklusif. Mereka akan dapat mengidentifikasi strategi dan praktik terbaik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka dalam konteks inklusi.

- b. Guru dapat mengharapkan dukungan tambahan dari kepala sekolah dan institusi mereka dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perbaikan pendidikan inklusif di sekolah mereka.
 - c. Guru akan dapat memahami bagaimana perkembangan teknologi dan perubahan sosial dalam era Society 5.0 memengaruhi pendidikan inklusif dan pekerjaan mereka. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih siap menghadapi tuntutan baru dalam mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan.
2. Untuk Kepala Sekolah
- a. Kepala sekolah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk memperkuat peran kepemimpinan mereka dalam mendukung guru dan implementasi pendidikan inklusif. Mereka dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memotivasi staf sekolah dan menciptakan lingkungan yang inklusif.
 - b. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana regulasi dan implementasi pendidikan inklusif berinteraksi dengan peran kepala sekolah. Hal ini akan membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait kebijakan sekolah dan alokasi sumber daya.
 - c. Kepala sekolah dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai alat untuk mengukur kinerja sekolah mereka dalam menghadapi pendidikan inklusif. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan sekolah.
3. Untuk Peneliti

Penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga pada literatur ilmiah dalam bidang pendidikan inklusif dan kepemimpinan pendidikan. Temuan penelitian dapat membantu memperkaya teori-teori yang ada. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para peneliti untuk memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang

dalam merancang kebijakan pendidikan yang mendukung pendidikan inklusif di era Society 5.0. Temuan dari penelitian ini pun dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dalam topik ini atau topik sejenis.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam kesiapan guru terkait regulasi dan implementasi pendidikan inklusif di era Society 5.0. Selanjutnya, bab ini merumuskan masalah penelitian, menguraikan tujuan penelitian baik secara umum maupun khusus, serta menjelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Terakhir, bab ini juga memberikan gambaran tentang struktur organisasi tesis yang terdiri dari lima bab utama, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi, dan rekomendasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji tiga topik utama yang membentuk landasan teoritis penelitian: kepemimpinan pendidikan, pendidikan inklusif, dan pendidikan di era Society 5.0. Kajian ini dimulai dengan pembahasan tentang kepemimpinan pendidikan, khususnya peran kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan inklusif. Selanjutnya, bab ini membahas konsep dan implementasi pendidikan inklusif, termasuk kurikulum, tujuan, dan manfaatnya. Terakhir, bab ini mengkaji bagaimana perkembangan teknologi dalam Society 5.0 menimbulkan tantangan dan peluang baru dalam pendidikan. Bab ini juga menyajikan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian yang diusulkan, yang menghubungkan aspek-aspek kepemimpinan, pendidikan inklusif, dan era digital untuk menyusun dasar teori dan prediksi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif yang digunakan untuk menguji hipotesis

melalui analisis data statistik. Penelitian ini melibatkan populasi dari 1.454 sekolah dasar di Kabupaten Garut dengan sampel sebanyak 200 sekolah yang ditentukan menggunakan teknik random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert, disebarakan baik secara online maupun fisik kepada kepala sekolah. Prosedur penelitian mencakup studi literatur, penyusunan proposal, identifikasi tujuan, dan analisis data menggunakan regresi linear berganda serta uji validitas dan reliabilitas.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.